

KOLABORASI ANTARAKTOR DALAM PENANGANAN KRISIS AIR BERSIH DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS: TINJAUAN TRIPLE HELIX

Mohammad Isbul

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: Mohammadisbul01@gmail.com

Abstract

This article examines the roles of government, academia, and business in responses to limited access to clean water in Bontoa District, Maros Regency, using the Triple Helix as an analytical lens. The study uses a descriptive qualitative approach drawing on interviews, observation, and documents reported in the study. The available account identifies government agencies and the regional water utility as the principal actors in planning and service delivery. It also refers to academic input in technical planning and emergency water distribution by humanitarian organizations. The latter are distinguished from the business sector, for which the manuscript offers little evidence of sustained participation. These observations suggest an uneven pattern of interaction rather than an established three-sector partnership. The absence of reported service indicators, documented joint decisions, and detailed sampling procedures limits any assessment of effects on household water access. The article recommends documenting actor roles and decisions alongside service coverage, continuity, and water-quality indicators before assessing whether a durable partnership improves supply.

Keywords: Water Governance, Multi-actor Collaboration, Triple Helix, Clean Water Services.

Abstrak

Artikel ini menelaah peran pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merespons keterbatasan akses air bersih di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan Triple Helix sebagai lensa analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumen yang dilaporkan dalam penelitian. Uraian yang tersedia menempatkan perangkat pemerintah dan Perumda Air Minum sebagai aktor utama perencanaan serta pelayanan. Hasil penelitian juga menyebut kontribusi akademik pada perencanaan teknis dan distribusi air darurat oleh organisasi kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan dibedakan dari dunia usaha, yang keterlibatan berkelanjutannya belum dapat ditunjukkan secara memadai. Temuan ini mengarah pada pola hubungan yang belum seimbang, bukan kemitraan tiga sektor yang telah terbentuk. Ketiadaan indikator pelayanan, bukti keputusan bersama, serta rincian pemilihan informan membatasi penilaian dampak kolaborasi terhadap akses rumah tangga. Pencatatan peran dan keputusan antaraktor perlu disertai data cakupan, kontinuitas, dan mutu air sebelum keberhasilan kemitraan dapat dinilai.

Kata kunci: Tata Kelola Air, Kolaborasi Antaraktor, Triple Helix, Pelayanan Air Bersih.

PENDAHULUAN

Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus ukuran kinerja pelayanan publik. Di Indonesia, kesenjangan akses air dan sanitasi antarwilayah masih menjadi persoalan sekalipun kondisi agregat membaik (Putirama, 2021). Kajian di Desa

Turikamaseang, Kecamatan Bontoa, mencatat warga yang mengandalkan air hujan dan Perumda, dengan jarak pengambilan air sekitar 100–1.000 meter serta waktu tempuh 5–30 menit bagi responden studi tersebut (Murni et al., 2023). Angka itu menggambarkan desa yang diteliti pada saat

kajian dilakukan; kondisi layanan dapat berbeda di desa lain.

Bontoa berada di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Kajian ini berangkat dari persoalan air tanah yang diduga dipengaruhi salinitas dan keterbatasan pelayanan jaringan. Akan tetapi, tidak ada hasil uji kualitas air, angka cakupan per desa, atau seri gangguan layanan dalam data yang digunakan. Artikel ini karena itu menggunakan istilah keterbatasan akses air bersih untuk menjelaskan masalah yang hendak diteliti, sedangkan luas dan tingkat keparahannya tetap memerlukan pengukuran tersendiri.

Persoalan akses air dapat berkaitan dengan kondisi sumber air, kapasitas jaringan, kontinuitas distribusi, dan kemampuan rumah tangga memperoleh pasokan alternatif. Masing-masing aspek membutuhkan bukti yang berbeda. Data sambungan rumah dan jam layanan Perumda dapat menjelaskan cakupan serta kontinuitas; uji laboratorium diperlukan untuk menilai mutu air; dan keterangan masyarakat diperlukan untuk memahami pengalaman penggunaan. Pemisahan ini penting agar penilaian kolaborasi tidak bertumpu pada anggapan bahwa pembangunan sarana otomatis meningkatkan akses. Kajian tata kelola lingkungan mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama memerlukan tindakan kolektif yang dapat diamati (Bodin, 2017); analisis jejaring juga harus memeriksa hubungan nyata antaraktor, bukan sekadar daftar lembaga (Berardo et al., 2020).

Penyediaan air melibatkan perencanaan publik, operasi layanan, produksi pengetahuan, dan kemungkinan kontribusi teknologi atau pembiayaan dari dunia usaha. Studi tentang inovasi sektor air menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat mempertemukan kapasitas yang berbeda, tetapi hubungan serta keluaran kerja sama perlu ditunjukkan secara empiris (Compagnucci & Spigarelli, 2018). Penilaian tata kelola kolaboratif juga perlu

membedakan kegiatan bersama yang dihasilkan dari perubahan layanan yang dirasakan masyarakat (Koebele, 2015). Studi perbandingan tata kelola kolaboratif menawarkan kerangka untuk membedakan unsur proses dan hasil di berbagai kasus, tetapi tidak menggantikan pengukuran layanan setempat (Douglas et al., 2020).

Triple Helix merujuk pada hubungan pemerintah, universitas, dan industri dalam produksi pengetahuan serta inovasi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Dalam studi ini, kerangka tersebut dipakai untuk menilai empat hal: identitas masing-masing aktor dari tiga unsur, kontribusi yang dapat ditelusuri, bentuk hubungan dalam perencanaan atau pelaksanaan, dan hasil bersama yang dapat diverifikasi. Perumda sebagai perusahaan milik pemerintah daerah ditempatkan dalam fungsi penyedia layanan publik pemerintah; PMI dan kelompok masyarakat dicatat sebagai aktor pendukung di luar tiga unsur inti. Kerangka sistem Triple Helix memisahkan komponen, hubungan, dan fungsi, sehingga keberadaan aktor saja belum menunjukkan terjadinya interaksi inovatif (Ranga & Etzkowitz, 2013).

Kerangka ini berbeda dari penggunaan istilah kolaborasi untuk setiap kegiatan yang melibatkan lebih dari satu organisasi. Bantuan tangki air oleh organisasi kemanusiaan, kajian teknis dari akademisi, dan perluasan jaringan oleh pemerintah dapat terjadi tanpa forum pengambilan keputusan bersama. Oleh sebab itu, keterlibatan beberapa aktor belum cukup untuk menyatakan bahwa kemitraan Triple Helix telah berjalan. Hubungan kerja, pembagian peran, sumber daya yang dipertukarkan, keputusan bersama, serta hasil layanan perlu diperiksa secara terpisah. Literatur tata kelola kolaboratif menekankan dialog, kepercayaan, dan kapasitas bertindak bersama sebagai unsur yang perlu diperiksa dalam proses (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Forum lintas lembaga dapat berfungsi sebagai wadah kolaborasi,

sedangkan bentuk pengelolaan jejaring menentukan siapa mengoordinasikan keputusan (Ansell & Gash, 2018; Provan & Kenis, 2008).

Kajian di lokasi lain memberi pembandingan konseptual, bukan bukti langsung tentang Bontoa. Koebele (2015) membedakan keluaran proses kolaboratif dari dampak tata kelola air. Penelitian Baird et al. (2019) menjelaskan perlunya menelusuri proses terbentuknya kerja sama lingkungan. Keduanya membantu merumuskan pertanyaan tentang siapa yang berkoordinasi, keputusan apa yang lahir, dan apakah perubahan tersebut berhubungan dengan layanan.

Kajian Bontoa yang tersedia menyoroiti akses dan ketersediaan air di Desa Turikamaseang (Murni et al., 2023). Artikel ini menggeser perhatian pada hubungan antarlembaga yang disebut berperan dalam perencanaan, pelayanan, kajian teknis, dan distribusi darurat. Fokus tersebut lebih sempit daripada klaim bahwa keseluruhan persoalan air Bontoa telah teratasi; penyebab hidrologis dan pengaruh kebijakan terhadap rumah tangga tidak dapat diuji dari uraian kelembagaan semata.

Pertanyaan analitisnya ialah sejauh mana peran pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dapat diidentifikasi, bagaimana hubungan di antara ketiganya berlangsung, dan kendala apa yang membatasi pembentukan kerja sama yang berkelanjutan. Kegiatan PMI serta pengalaman masyarakat diperhatikan untuk memahami konteks penanganan darurat dan kebutuhan pengguna, tanpa menjadikannya pengganti unsur industri dalam Triple Helix.

Dengan cara itu, penilaian membedakan kehadiran aktor, aktivitas masing-masing, koordinasi lintas aktor, dan dampak yang terukur pada layanan. Jika bahan hanya menunjukkan aktivitas lembaga secara terpisah, kesimpulan dibatasi pada pemetaan peran. Jika terdapat dokumen keputusan,

pembagian tugas, atau kegiatan bersama, bukti tersebut dapat mendukung penilaian mengenai kualitas hubungan antarlembaga. Tinjauan penelitian jejaring menunjukkan bahwa bentuk koordinasi perlu dibedakan dari efektivitasnya dan dinilai sesuai konteks masing-masing (van den Oord et al., 2023).

Kontribusi artikel terletak pada pengujian batas penerapan Triple Helix untuk layanan air pada wilayah pesisir ketika pemerintah dan organisasi kemanusiaan lebih tampak daripada perusahaan swasta. Pembedaan unsur inti dan aktor pendukung memungkinkan diagnosis kelembagaan yang lebih tepat. Hasilnya tidak dimaksudkan untuk menyatakan keberhasilan peningkatan akses air tanpa indikator pelayanan yang sebanding sebelum dan sesudah intervensi.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran aktor dalam penanganan keterbatasan air bersih di Kecamatan Bontoa dan menilai sejauh mana interaksi yang terlapor memenuhi unsur Triple Helix. Analisis juga menelaah kondisi yang mendukung dan membatasi koordinasi, dengan memisahkan bukti aktivitas organisasi dari bukti perubahan layanan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bahan penelitian yang dilaporkan meliputi wawancara dengan unsur pemerintah daerah dan kecamatan, Perumda Air Minum Tirta Bantimurung, akademisi, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat; observasi; dan telaah dokumen. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi menurut aktor, bentuk kontribusi, hubungan kerja, dan hasil yang dapat ditelusuri, lalu membandingkan klaim antarsumber sebelum menarik kesimpulan. Penelitian ini belum merinci jumlah dan cara memilih informan, waktu serta lokasi desa yang dicakup, pedoman wawancara, daftar dokumen, catatan observasi, atau prosedur persetujuan partisipan. Ketiadaan rincian tersebut

membatasi penilaian kecukupan dan keabsahan data; karena itu, uraian ini bersifat pemetaan tematik, bukan pengukuran keberhasilan program atau gambaran yang mewakili seluruh warga Kecamatan Bontoa. Pengelompokan tematik dan pemeriksaan silang antarsumber mengikuti pertimbangan metodologis penelitian kualitatif (Fadli, 2021; Nowell et al., 2017). Kecukupan wawancara belum dapat dinilai menurut prosedur saturasi karena jumlah dan urutan wawancara tidak dilaporkan (Guest et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor Pemerintah

Bahan yang tersedia menempatkan pemerintah pada fungsi perencanaan, pembangunan, dan koordinasi kebutuhan layanan. Peran ini sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Namun, untuk menilai intensitas dan dampaknya dibutuhkan dokumen program bernama, tahun pelaksanaan, lokasi, anggaran, hasil pekerjaan, dan perubahan kondisi pelanggan. Tanpa rangkaian bukti tersebut, uraian hanya menunjukkan jenis tanggung jawab kelembagaan.

Bapperida disebut dalam penyusunan rencana, sedangkan perangkat pekerjaan umum disebut berkaitan dengan jaringan perpipaan dan prasarana pendukung. Naskah awal belum mengidentifikasi RPJMD, RKPD, atau RISPAM tertentu yang memuat kegiatan Bontoa beserta status pelaksanaannya. Karena itu, kegiatan pembangunan yang dikemukakan dibaca sebagai peran yang dilaporkan, bukan keluaran fisik yang telah diverifikasi. Prioritas kebijakan juga belum dapat diukur hanya dari penyebutan lembaga perencanaan.

Perumda Air Minum Tirta Bantimurung memiliki fungsi operasional dalam penyediaan dan distribusi air. Akan tetapi, data yang dianalisis belum memuat jumlah sambungan rumah menurut desa, kapasitas produksi, jam layanan, kejadian gangguan, dan cakupan

sebelum serta sesudah program. Data tersebut diperlukan untuk menentukan wilayah yang belum terlayani dan membedakan persoalan kapasitas jaringan dari kontinuitas aliran. Pemerintah kecamatan dilaporkan menyalurkan kebutuhan warga kepada pemerintah daerah, tetapi mekanisme dan tindak lanjutnya belum terdokumentasi. Posisi pemerintah tampak paling jelas dibanding unsur lain karena naskah menguraikan fungsi perencanaan serta penyediaan layanan. Namun, dominasi dalam pengambilan keputusan belum dapat dipastikan tanpa catatan forum, alokasi sumber daya, dan kesaksian lintas aktor. Hasil yang dapat ditegaskan ialah bahwa hubungan antara rencana pemerintah, masukan akademik, dan kontribusi usaha belum diperlihatkan sebagai satu rangkaian keputusan bersama. Dalam kajian kolaborasi, distribusi pengaruh antaraktor juga dapat membatasi keputusan bersama, sehingga jejak siapa mengajukan dan menyetujui pilihan perlu didokumentasikan (Brisbois et al., 2019).

Aktor Akademisi

Kontribusi akademisi dalam Triple Helix seharusnya terlihat melalui penelitian, perancangan solusi teknis, dan umpan balik evaluasi. Hasil penelitian menyebut Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) serta studi kelayakan, tetapi belum mengidentifikasi perguruan tinggi, peneliti, judul dokumen, atau keputusan yang menggunakan hasil kajian itu. Karena itu, posisi akademisi sementara dapat dipahami sebagai sumber pengetahuan yang dilaporkan terlibat pada tahap perencanaan.

Untuk menilai keterlibatan akademik, perlu ditelusuri siapa yang menyusun kajian, pada tahun berapa, opsi teknologi atau lokasi apa yang diusulkan, dan apakah rekomendasi tersebut diadopsi dalam program pemerintah/Perumda. Keterhubungan dari kajian ke keputusan merupakan bukti interaksi; keberadaan dokumen kajian saja

belum menunjukkan kolaborasi yang menghasilkan inovasi.

Dengan ukuran tersebut, naskah belum dapat memastikan apakah hubungan akademisi dengan pemerintah berlangsung secara rutin, sekali waktu, atau hanya berbentuk konsultasi. Pernyataan bahwa keputusan telah didasarkan pada pengetahuan ilmiah memerlukan jejak penggunaan rekomendasi. Kesenjangan bukti ini penting bagi penilaian Triple Helix, karena kontribusi pengetahuan perlu bertemu dengan kewenangan kebijakan dan kapasitas implementasi.

Dunia Usaha serta Aktor Pendukung di Luar Triple Helix

Dunia usaha merupakan unsur industri dalam Triple Helix, sedangkan PMI, organisasi sosial, dan warga merupakan aktor pendukung lain. Data yang dianalisis belum mengidentifikasi perusahaan tertentu, kontribusi pendanaan atau teknologi, perjanjian kerja sama, maupun investasi yang dapat ditelusuri. Penilaian yang dapat dibuat terbatas pada belum terdokumentasikannya hubungan usaha yang berkelanjutan dalam penelitian ini.

PMI Kabupaten Maros disebut berpartisipasi dalam distribusi air pada saat kekurangan pasokan. Kegiatan kemanusiaan tersebut relevan untuk respons darurat, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai kontribusi perusahaan swasta. Waktu, lokasi, volume distribusi, penerima bantuan, dan bentuk koordinasinya dengan pemerintah belum tersedia. Tanpa catatan itu, skala bantuan dan pengaruhnya terhadap ketersediaan air tidak dapat dihitung.

Perbedaan fungsi antaraktor menjelaskan keterbatasan kemitraan saat ini. Pemerintah dan Perumda dapat mengelola rencana serta layanan, akademisi dapat menyediakan kajian, sementara organisasi sosial menutup sebagian kebutuhan darurat. Tidak adanya bukti mengenai perusahaan membuat salah satu hubungan kunci Triple Helix tidak dapat

dianalisis lebih jauh. Ini tidak membuktikan perusahaan sama sekali tidak terlibat; cakupan penelusuran aktor usaha dalam penelitian memang belum dijelaskan.

Oleh sebab itu, istilah kolaborasi di sini merujuk pada kemungkinan koordinasi antarlembaga yang dilaporkan, bukan status kemitraan formal yang sudah teruji. Untuk menilai kemitraan perlu diperiksa forum bersama, perjanjian, pembagian tanggung jawab, penggunaan hasil kajian, dan pemantauan capaian layanan. Perbedaan antara keluaran kerja sama dan perubahan akses air mengikuti penekanan Koebele (2015) pada hasil proses dan hasil kebijakan. Penelitian longitudinal tentang jejaring pelayanan menegaskan perlunya menilai hubungan antarlembaga bersama hasil yang hendak dicapai, alih-alih menyimpulkan efektivitas dari struktur jejaring saja (Siciliano et al., 2021).

Faktor yang Membentuk dan Membatasi Hubungan Antaraktor

Dari pemetaan peran, kewenangan pemerintah dalam perencanaan dan operasi Perumda merupakan kapasitas dasar untuk mengoordinasikan penyediaan air. Kajian akademik berpotensi memperbaiki pilihan teknis, sedangkan PMI dapat membantu respons sementara. Namun, data yang dianalisis belum memperlihatkan urutan keputusan dan bentuk koordinasi yang memungkinkan kesimpulan sebab-akibat bahwa ketiga hal itu telah meningkatkan akses masyarakat.

Hambatan utama pada tingkat bukti ialah belum teridentifikasinya kontribusi perusahaan serta tidak ditunjukkannya forum, perjanjian, jadwal, atau pembagian tugas bersama. Data yang tersedia belum dapat memastikan apakah mekanisme itu tidak ada atau belum terjangkau pengumpulan data. Keduanya harus dibedakan: yang pertama merupakan hambatan kelembagaan; yang kedua merupakan keterbatasan penelitian.

Perbaikan kelembagaan memerlukan pendataan layanan dan aktor dalam satu kerangka: pemerintah/Perumda mencatat kebutuhan serta kinerja per desa, akademisi menjelaskan pilihan teknis dan hasil uji, dunia usaha menyatakan bentuk kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat dan PMI menyediakan umpan balik mengenai kebutuhan serta respons darurat. Keberhasilan kerja sama baru dapat dinilai ketika catatan keputusan bersama dihubungkan dengan perubahan cakupan, kontinuitas, dan mutu layanan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Perumda menempati posisi paling jelas dalam uraian penanganan keterbatasan air bersih di Bontoa. Kontribusi akademisi dalam kajian teknis dan distribusi darurat oleh PMI disebutkan, tetapi rantai bukti dari kegiatan tersebut ke keputusan bersama dan perbaikan layanan belum tersedia. PMI merupakan organisasi kemanusiaan di luar tiga unsur inti Triple Helix.

Keterlibatan perusahaan swasta belum dapat dinilai secara memadai karena perusahaan, kegiatan, dan dokumen kerja samanya tidak diidentifikasi. Hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri karenanya belum dapat disimpulkan sebagai kemitraan Triple Helix yang terintegrasi. Temuan yang lebih tepat ialah pemetaan peran yang belum seimbang dan kebutuhan untuk mendokumentasikan hubungan antarlembaga.

Penelitian terbatas pada uraian tematik yang tidak menyajikan rincian pemilihan dan jumlah informan, lokasi desa dan periode penelitian, catatan wawancara atau observasi, dokumen program tertentu, serta data layanan menurut waktu. Keterbatasan tersebut menghalangi pengukuran dampak kolaborasi dan generalisasi mengenai seluruh Kecamatan Bontoa. Penelitian lanjutan perlu menautkan pengalaman warga, keputusan antarlembaga, dan indikator hasil pelayanan..

DAFTAR PUSTAKA

- Putirama, K. D. (2021). Interregional disparity and spatial autocorrelation of access to water and sanitation in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(3), 372–395. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i3.233>
- Murni, M., Ibrahim, I., Romlah, R., & Hidayah, N. (2023). Akses ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Desa Turikamaseang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Social Landscape Journal*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.56680/slj.v4i1.41342>
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352), eaan1114. <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Berardo, R., Fischer, M., & Hamilton, M. (2020). Collaborative governance and the challenges of network-based research. *The American Review of Public Administration*, 50(8), 898–913. <https://doi.org/10.1177/0275074020927792>
- Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2018). Fostering cross-sector collaboration to promote innovation in the water sector. *Sustainability*, 10(11), 4154. <https://doi.org/10.3390/su10114154>
- Koebele, E. A. (2015). Assessing outputs, outcomes, and barriers in collaborative water governance: A case study. *Journal of Contemporary Water Research & Education*, 155(1), 63–72. <https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2015.03196.x>
- Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., Torfing, J., & Wihlborg, E. (2020). Understanding collaboration: Introducing the collaborative governance case databank. *Policy and Society*, 39(4), 495–509.

- <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: An analytical framework for innovation policy and practice in the knowledge society. *Industry and Higher Education*, 27(4), 237–262. <https://doi.org/10.5367/ihe.2013.0165>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Baird, J., Schultz, L., Plummer, R., Armitage, D., & Bodin, Ö. (2019). Emergence of collaborative environmental governance: What are the causal mechanisms? *Environmental Management*, 63(1), 16–31. <https://doi.org/10.1007/s00267-018-1105-7>
- van den Oord, S., Kenis, P., Raab, J., & Cambré, B. (2023). Modes of network governance revisited: Assessing their prevalence, promises, and limitations in the literature. *Public Administration Review*, 83(6), 1564–1598. <https://doi.org/10.1111/puar.13736>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Brisbois, M. C., Morris, M., & de Loë, R. C. (2019). Augmenting the IAD framework to reveal power in collaborative governance: An illustrative application to resource industry dominated processes. *World Development*, 120, 159–168. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.017>
- Siciliano, M. D., Carr, J. B., & Hugg, V. G. (2021). Analyzing the effectiveness of networks for addressing public problems: Evidence from a longitudinal study. *Public Administration Review*, 81(5), 895–910. <https://doi.org/10.1111/puar.13336>